

**PENGARUH INFLASI, PENGELUARAN KONSUMSI PEMERINTAH,
HUTANG LUAR NEGERI DAN PEMBIAYAAN SYARIAH
TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI DI INDONESIA
(TRIWULAN I-TRIWULAN IV) TAHUN 2011-2018
PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM**

Eny Widiaty^{1*}, Anton Priyo Nugroho²

¹Magister Ilmu Agama Islam, FIAI, Universitas Islam Indonesia

²Dosen Ilmu Agama Islam, FIAI, Universitas Islam Indonesia

*e-mail: eny.widiaty0123@gmail.com

ABSTRACT

Economic growth is one of very important indicators in assessing the economic performance – particularly to do an analysis on the output of economic growth that has been implemented by a country or a region. In assessing the economic growth, it can use a number of important variables such as inflation, Government Consumption Expenditure, foreign debts and sharia finance. In turn, this research aims to analyze the impacts of these variables on the economic growth in Indonesia (Quarter I – Quarter IV) in period of 2011-2018. The Error Correction Model (ECM) was used in the analysis method to estimate the long-term and short-term impacts of the independent variables on the dependent ones. The results of the analysis showed that the variable inflation in the long-term had a negative impact on the economic growth; while, in short-term, the level of inflation in fact had a positive impact on the economic growth. Meanwhile, the variable of Government Consumption Expenditure had a negative contribution on the economic growth. Furthermore, it was found that the foreign debt in the long term had a negative impact on the economic growth but for the short term it could bring the positive one. Variable of Sharia finance showed a good result both in short term and in long term with a negative correlation with economic growth in Indonesia. However, all variables of inflation, Government Consumption Expenditure, foreign debts and sharia finance simultaneously had an impact on National Economic Growth.

Keywords: *Economic Growth, Inflation, Government Consumption Expenditure, Foreign Debt, Sharia Finance, Error Corection Model (ECM).*

PENDAHULUAN

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator yang amat penting dalam menilai kinerja suatu perekonomian, terutama untuk melakukan analisis tentang hasil pembangunan ekonomi yang telah dilaksanakan suatu negara atau daerah. Ekonomi dikatakan mengalami pertumbuhan apabila produksi barang dan jasa meningkat dari tahun sebelumnya. Oleh karena itu, pertumbuhan ekonomi menunjukkan sejauh mana aktivitas perekonomian dapat menghasilkan tambahan pendapatan atau kesejahteraan masyarakat pada periode tertentu.

Pertumbuhan ekonomi suatu negara atau wilayah yang terus menunjukkan peningkatan, maka itu menggambarkan bahwa perekonomian negara atau wilayah tersebut berkembang dengan baik.¹

Adapun Badan Pusat Statistik (BPS) merilis data pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2011-2018 mengalami fluktuasi. Pada triwulan IV tahun 2018 ekonomi Indonesia tumbuh sebesar 5,18 persen melenceng dari target yang ditetapkan sebesar 5,4 persen, meski demikian pertumbuhan pada triwulan IV tahun 2018 lebih tinggi dari triwulan III tahun 2018 sebesar 5,17 persen. Akan tetapi pertumbuhan ekonomi Indonesia triwulan IV tahun 2018 menurun 1 persen dari triwulan IV tahun 2017 yaitu sebesar 5,19 persen. Namun demikian, lebih tinggi dari triwulan IV tahun 2016, 2015, dan 2014, yakni sebesar 4,94 persen pada triwulan IV tahun 2016, kemudian 5,04 persen pada triwulan IV tahun 2015, dan 5,02 persen pada triwulan IV tahun 2014. Sementara pertumbuhan ekonomi tertinggi pada triwulan IV tahun 2011 sebesar 6,50 persen, diikuti triwulan IV tahun 2012 sebesar 6,23 persen dan 5,78 persen pada triwulan IV tahun 2013.

Dalam perkembangannya, pertumbuhan ekonomi dari beberapa tahun mengalami naik turun dan salah satu yang mempengaruhinya adalah permintaan agregat. Permintaan agregat sendiri dipengaruhi oleh harga sesuai dengan hukum permintaan di mana jika harga naik maka permintaan turun. Menurut teori Keynesian, yang dipelori oleh J.M.Keynes, Keynes menyatakan bahwa dalam jangka pendek *output* nasional dan kesempatan kerja terutama ditentukan oleh permintaan agregat. Kaum Keynesian yakin bahwa kebijakan moneter maupun kebijakan fiskal harus digunakan untuk mengatasi pengangguran dan menurunkan laju inflasi.²

Inflasi merupakan kejadian ekonomi yang sering terjadi meskipun masyarakat tidak pernah menghendaki. Meskipun inflasi memberikan dampak buruk pada pertumbuhan ekonomi bukan berarti inflasi harus diturunkan sampai nol persen. Apabila laju inflasi nol persen maka ini juga tidak memacu terjadinya pertumbuhan ekonomi, tetapi akan menimbulkan stagnasi. Kebijakan akan sangat berarti bagi kegiatan ekonomi, apabila bisa menjaga laju inflasi berada di tingkat yang sangat rendah.³

Herman Ardiansyah (2017) yang meneliti tentang “Pengaruh Inflasi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia” menemukan dalam jangka pendek maupun jangka panjang inflasi berkorelasi negatif terhadap pertumbuhan ekonomi. Prima Andia Daniel (2018) juga melakukan penelitian yang sama dan ditemukan hasil bahwa inflasi mempunyai pengaruh negatif terhadap pertumbuhan ekonomi.

Pertumbuhan ekonomi sebagai tolok ukur suatu negara, juga tidak terlepas dari peran pemerintah dalam menyediakan dana untuk membiayai kegiatan pembangunan baik bidang ekonomi maupun non ekonomi. Biaya kegiatan ini sering disebut sebagai pengeluaran

¹ Syahrur Romi dan Etik Umiyati, “Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi dan Upah Minimum Terhadap Kemiskinan di Kota Jambi”, *e-Jurnal Perspektif dan Pembangunan Daerah*, Vol. 7, No. 1, (Januari-April 2018), hlm. 1-2.

² Herman Ardiansyah, “Pengaruh Inflasi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia”, *Jurnal Pendidikan Ekonomi*, Vol. 5, No. 3, (Tahun 2017), hlm. 2.

³ *Ibid.*

pemerintah. Sodik (2007), mengungkapkan bahwa pengeluaran pemerintah yang proporsional akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi.⁴

Lutfiana Fiqry Lehvani dan Hadi Susana (2019) mengungkapkan dalam penelitiannya tentang “Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di ASEAN 5”, bahwa pengeluaran konsumsi pemerintah berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di negara ASEAN. Begitu juga dengan penelitian yang dilakukan oleh Merlin Anggraeni (2017) dan Zahari MS (2017) ditemukan hasil bahwa pengeluaran konsumsi pemerintah berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi.

Tidak hanya pengeluaran konsumsi pemerintah, hingga saat ini hutang luar negeri masih menjadi salah satu sumber yang sangat penting dalam pembiayaan pembangunan di banyak negara termasuk di Indonesia. Sebagai negara berkembang pengaruh hutang luar negeri mempunyai arti penting terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Hutang luar negeri merupakan sumber pembiayaan anggaran pemerintah dan pembangunan ekonomi. Hutang luar negeri dimanfaatkan untuk membiayai belanja negara sehingga dapat mendukung kegiatan ekonomi, terutama kegiatan-kegiatan produktif yang demikian pada gilirannya akan mendorong pertumbuhan ekonomi.⁵

Penelitian Dedi Junaedi (2018) dengan judul “Hubungan Antara Utang Luar Negeri dengan Perekonomian dan Kemiskinan: Komparasi Antarezim Pemerintahan”, menemukan adanya korelasi positif utang luar negeri terhadap pertumbuhan ekonomi nasional, khususnya nilai Produk Domestik Bruto Indonesia dan tingkat kemiskinan. Utang cenderung meningkatkan nilai PDB dan menurunkan angka kemiskinan. Dalam penelitian lain dengan tema yang sama oleh Syaparuddin, dkk (2015), di mana fokusnya adalah hutang luar negeri di Indonesia, Thailand, Malaysia, Filipina, Vietnam, dan Burma. Maka dalam penelitiannya diperoleh hasil pada Negara Indonesia, Malaysia, dan Vietnam serta Thailand peningkatan hutang luar negeri berakibat pada perlambatan atau penurunan pertumbuhan ekonomi. Sedangkan yang dapat mendorong peningkatan pertumbuhan ekonomi terjadi di Filipina dan Myanmar.

Tidak kalah pentingnya, sektor perbankan juga memiliki pengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi. Kinerja positif sektor keuangan dan perbankan akan berkorelasi positif terhadap kinerja ekonomi suatu negara. Sektor keuangan dan perbankan bisa menjadi sumber utama pertumbuhan sektor *rill* ekonomi. Saat ini juga telah hadir sistem perbankan syariah yang memiliki karakteristik yang berbeda dengan bank konvensional. Sistem perbankan syariah menawarkan produk dan layanan keuangan dan perbankan yang relatif sama dengan sistem konvensional namun mereka beroperasi sesuai dengan ketentuan-ketentuan syariah terutama dalam transaksinya yang tidak mengandung unsur *riba*, *maysir*, dan *gharar*. Studi tentang pengaruh pembiayaan sektor perbankan syariah terhadap pertumbuhan ekonomi masih relatif terbatas. Mengingat juga industri ini di Indonesia masih relatif kecil, tidak lebih dari 5% pangsa

⁴ M. Zahari MS, “Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Jambi”, *Jurnal of Economics and Business*, Vol. 1, No. 1, (September 2017), hlm. 183.

⁵ Dedi Junaedi, “Hubungan Antara Utang Luar Negeri dengan Perekonomian dan Kemiskinan: Komparasi Antarezim Pemerintahan”, *Simposium Nasional Keuangan Negara*, (Tahun 2018), hlm. 565.

pasarnya.⁶ Namun, dilihat dari data perbankan syariah jumlah pembiayaan yang disalurkan dari tahun ke tahun terus mengalami peningkatan.

Prastowo (2018) yang meneliti tentang “Pengaruh Pembiayaan Bank Syariah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi: Studi Empiris di 13 Negara”. Mendapatkan hasil bahwa pembiayaan syariah berkorelasi positif terhadap pertumbuhan ekonomi. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Ali Rama (2017) dan Widia Astuty (2015) juga mendapatkan hasil bahwa pembiayaan syariah berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi.

Permasalahan terkait pertumbuhan ekonomi, inflasi, pengeluaran konsumsi pemerintah, hutang luar negeri, dan pembiayaan syariah ternyata mendapat perhatian serius dalam Islam. Sama halnya dengan teori ekonomi konvensional, Islam mendefinisikan pertumbuhan ekonomi sebagai perkembangan yang terus menerus dari faktor produksi secara benar yang mampu memberikan kontribusi bagi kesejahteraan manusia. Akan tetapi dalam Islam, suatu peningkatan yang dialami oleh faktor produksi tidak dianggap sebagai pertumbuhan ekonomi jika produksi tersebut misalnya memasukkan barang-barang yang terbukti memberikan efek buruk dan membahayakan manusia.⁷

Permasalahan inflasi juga menjadi perhatian oleh para ahli ekonomi Islam, salah satunya adalah Al-Maqrizi. Dengan mengemukakan berbagai fakta bencana kelaparan yang pernah terjadi di Mesir, Al-Maqrizi menyatakan bahwa peristiwa inflasi merupakan sebuah fenomena alam yang menimpa kehidupan seluruh masyarakat di seluruh dunia sejak masa dahulu hingga sekarang. Menurutnya, inflasi terjadi karena harga-harga secara umum mengalami kenaikan dan berlangsung terus menerus.

Dalam mendukung pertumbuhan ekonomi, intervensi yang dimiliki oleh pemerintah yaitu terkait pengeluaran pemerintah. Pengeluaran pemerintah merupakan bagian dari kebijakan fiskal negara, di mana kebijakan fiskal sudah sejak lama dikenal dalam teori ekonomi Islam yaitu sejak zaman Rasulullah SAW dan *Khulafaur Rasyidin*, serta kemudian dikembangkan lebih lanjut oleh para ulama yaitu terkait penerimaan negara dan sumber pengeluaran negara.⁸ Pengeluaran dalam negara Islam harus diupayakan untuk mendukung ekonomi masyarakat muslim. Jadi, pengeluaran pemerintah akan diarahkan pada kegiatan-kegiatan pemahaman terhadap Islam dan meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Permasalahan hutang luar negeri dalam piranti ekonomi Islam terdapat dua pendapat, ada yang membolehkan dan ada yang menolak. Pinjaman dari negara-negara asing dan lembaga keuangan internasional, menurut Zallum tidak diperbolehkan oleh hukum syara', sebab pinjaman seperti ini selalu terkait dengan riba dan syarat-syarat tertentu, sedangkan riba sudah jelas

⁶ Ade Ananto Terminanto, “Pengaruh Belanja Pemerintah dan Pembiayaan Bank Syariah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi: Studi Kasus Data Panel Provinsi di Indonesia”, *IQTISHADIA*, Vol. 10, No. 1, (Tahun 2017), hlm. 100-101.

⁷ Rizal Muttaqin, “Pertumbuhan Ekonomi dalam Perspektif Islam”, *Mara, Jurnal Ekonomi Syariah dan Bisnis*, Vol. 1, No. 2, (November 2018), hlm. 19.

⁸ Gempito, “Pemikiran Kebijakan Fiskal Ekonomi Islam”, *JURIS*, Vol. 9, No. 1, (Juni 2010), hlm. 34.

diharamkan di dalam Islam.⁹ Adapun Umer Chapra membolehkan konsep defisit anggaran, yang adapun pembiayaan defisit APBN Umer Chapra melalui 3 unsur yaitu: penerimaan yang mana berasal dari pajak yang adil dengan ketentuan sesuai *Maqashid Syari'ah*, pengeluaran yang mana dengan kesejahteraan umum sebagai prioritas utama dan pembiayaan itu sendiri dengan pembiayaan berbasis sukuk untuk menghindari hutang yang mengandung riba.¹⁰

KERANGKA TEORI

Pertumbuhan Ekonomi

Secara singkat, pertumbuhan ekonomi merupakan suatu proses kenaikan *output* per kapita. Pertumbuhan ekonomi berarti perkembangan kegiatan dalam perekonomian yang menyebabkan barang dan jasa yang diproduksi dalam masyarakat meningkat.¹¹ Namun menurut teori Keynes, pertumbuhan ekonomi terbentuk dari empat faktor yang secara positif mempengaruhinya, keempat faktor tersebut adalah konsumsi, investasi, pengeluaran pemerintah, dan ekspor neto. Keempat faktor tersebut kembali dipengaruhi oleh berbagai macam faktor, antara lain dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti: tingkat harga, suku bunga, tingkat inflasi, *money supply*, nilai tukar, dan sebagainya.

Dalam berbagai literatur tentang ekonomi Islam, pada dasarnya ekonomi Islam memandang bahwa pertumbuhan ekonomi adalah bagian dari pembangunan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi didefinisikan dengan *a sustained growth of a right kind of output which can contribute to human welfare* (pertumbuhan terus-menerus dari faktor produksi secara benar yang mampu memberikan kontribusi bagi kesejahteraan manusia).¹² Berdasarkan pengertian di atas, maka pertumbuhan ekonomi menurut Islam merupakan hal yang sarat nilai. Suatu peningkatan yang dialami oleh faktor produksi tidak dianggap sebagai pertumbuhan ekonomi jika produksi tersebut misalnya memasukkan barang-barang yang terbukti memberikan efek buruk dan membahayakan manusia.¹³

Inflasi

Secara umum inflasi dapat diartikan sebagai kenaikan tingkat harga barang dan jasa secara umum dan terus menerus selama waktu tertentu. Definisi lain inflasi adalah kecenderungan dari harga-harga untuk menaikkan secara umum dan terus menerus dalam jangka waktu yang lama. Kenaikan harga dari satu atau dua barang saja tidak disebut inflasi, kecuali bila kenaikan

⁹ Muhajirin, "Konsep Hutang Negara dalam Perspektif Hukum Ekonomi Islam (Studi Analisis Antara Konsep Anggaran Balance Budget dengan Defisit Budget)", *Al Maslahah Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam*, Vol. 3, NO. 6, (Tahun 2015), hlm. 351.

¹⁰ Fatturoyhan dan Mufti Afif, "Pembiayaan Defisit APBN Menurut Umer Chapra (Studi Analisa Kritis Terhadap Pembiayaan Defisit APBN Indonesia)", *CAKRAWALA: Jurnal Studi Islam*, Vol. XII, No. 1, (Tahun 2017), hlm. 11-12.

¹¹ Azwar, "Peran Alokatif Pemerintah Melalui Pengadaan Barang/Jasa dan Pengaruhnya Terhadap Perekonomian Indonesia", *Kajian Ekonomi & Keuangan*, Vol. 2, No. 2, (Agustus 2016), hlm. 153.

¹² Tiara Nur Fitria, "Kontribusi Ekonomi Islam dalam Pembangunan Ekonomi Nasional", *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, Vol. 02, No. 03, (November 2016), hlm. 31.

¹³ *Ibid.*

tersebut meluas kepada (atau mengakibatkan kenaikan) sebagian besar dari harga barang-barang lain.¹⁴

Menurut para ekonom Islam, inflasi berakibat sangat buruk bagi perekonomian karena:

1. Menimbulkan gangguan terhadap fungsi uang, terutama terhadap fungsi tabungan (nilai simpan), fungsi dari pembayaran di muka, dan fungsi dari unit perhitungan. Orang harus melepaskan diri dari uang dan aset keuangan akibat dari beban inflasi tersebut. Inflasi juga telah mengakibatkan terjadinya inflasi kembali, atau dengan kata lain '*self feeding inflation*';
2. Melemahkan semangat menabung dan sikap terhadap menabung dari masyarakat (turunnya *Marginal Propensity to Save*);
3. Meningkatkan kecendrungan untuk berbelanja terutama untuk non-primer dan barang-barang mewah (naiknya *Marginal Propensity to Consume*);
4. Mengarahkan investasi pada hal-hal yang non-produktif yang menumpukkan kekayaan (*hoarding*) seperti: tanah, bangunan, logam mulia, mata uang asing dengan mengorbankan investasi ke arah produktif seperti: pertanian, industrial, perdagangan, transportasi, dan lainnya.¹⁵

Berdasarkan teori tersebut di atas, maka lahir hipotesis satu, yaitu:

H1 : Inflasi mempunyai pengaruh negatif terhadap Pertumbuhan Ekonomi

Pengeluaran Konsumsi Pemerintah

Pengeluaran pemerintah merupakan salah satu intervensi pemerintah terhadap perekonomian yang dianggap paling efektif. Pengeluaran pemerintah adalah konsumsi barang dan jasa yang dilakukan pemerintah serta pembiayaan yang dilakukan Pemerintah untuk keperluan administrasi pemerintahan dan kegiatan-kegiatan pembangunan.¹⁶ Adapun Sukirno (2009) menjelaskan, pengeluaran pemerintah (*government expenditure*) adalah bagian dari kebijakan fiskal, yaitu suatu tindakan pemerintah untuk mengatur jalannya perekonomian dengan cara menentukan besarnya penerimaan dan pengeluaran pemerintah setiap tahunnya, yang tercermin dalam dokumen Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) untuk nasional dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) untuk daerah atau regional. Tujuan dari kebijakan fiskal ini adalah dalam rangka menstabilkan harga, tingkat *output*, maupun kesempatan kerja dan memacu atau mendorong pertumbuhan ekonomi.¹⁷

Di dunia Islam, pemerintahan memerlukan dana untuk menggunakan APBN dalam rangka mengendalikan pengeluaran pemerintah yang sesuai dengan jumlah pendapatannya. Tujuan dari anggaran pemerintah adalah menopang tujuan yang ingin dicapai oleh pemerintah. Tujuan pokok dari setiap pemerintahan Islam adalah memaksimalkan kesejahteraan seluruh

¹⁴ Aziz Septiatin, dkk, "Pengaruh Inflasi dan Tingkat Pengangguran Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia", *I-Economic*, Vol. 2, No. 1, (Juli 2016), hlm. 52.

¹⁵ Adiwarmanto A. Karim, 2014, *Ekonomi Makro Islam (Edisi 3)*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), hlm. 139.

¹⁶ Sri Danawati, "Pengaruh Pengeluaran Pemerintah dan Investasi Terhadap Kesempatan Kerja, Pertumbuhan Ekonomi Serta Ketimpangan Pendapatan Kabupaten/Kota di Provinsi Bali", *E-Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, Vol. 5, No. 7, (Tahun 2016), hlm. 2125.

¹⁷ Rahmita Handayani, "Analisis Pengeluaran Pemerintah Sektor Pendidikan dan Kesehatan Terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Riau", *Jom FEKON*, Vol. 2, No. 2, (Oktober 2015), hlm. 3.

warga negara dengan tidak mengabaikan prinsip-prinsip keadilan. Lebih jauh lagi, dalam Islam yang dimaksud dengan kesejahteraan bukanlah semata-mata diperoleh dari kekayaan material, yang setiap tahun dapat diukur dengan statistik pendapatan nasional, tetapi termasuk juga kesejahteraan rohani di dunia dan akhirat.¹⁸

Berdasarkan teori tersebut di atas, maka lahir hipotesis dua, yaitu:

H2 : Pengeluaran Konsumsi Pemerintah mempunyai pengaruh positif terhadap Pertumbuhan Ekonomi

Hutang Luar Negeri

Menurut SKB Menteri Keuangan dan Kepala Bappenas (No.185/KMK.03/1995 dan Nomor KEP.031/KET/5/1995), Pinjaman Luar Negeri adalah penerimaan negara baik dalam bentuk devisa, dan atau devisa yang dirupiahkan maupun dalam bentuk barang dan atau jasa yang diperoleh dari pemberian pinjaman luar negeri yang harus dibayar kembali dengan persyaratan tertentu.¹⁹ Adapun dijelaskan *foreign aid* atau bantuan luar negeri adalah suatu bentuk transfer dana masyarakat internasional dalam bentuk pinjaman (*loans*) dan hibah (*grants*) baik secara langsung dari suatu negara ke negara lainnya (*bilateral assistance*) atau secara tidak langsung melalui lembaga-lembaga bantuan *multilateral* atau (*multilateral assistance*).²⁰

Dedi Junaedi (2018) menegaskan, hutang luar negeri merupakan sumber pembiayaan anggaran pemerintah dan pembangunan ekonomi. Hutang luar negeri dimanfaatkan untuk membiayai belanja negara sehingga dapat mendukung kegiatan ekonomi, terutama kegiatan-kegiatan produktif sehingga pada gilirannya akan mendorong pertumbuhan ekonomi. Di mana dalam penelitiannya ditemukan bahwa hutang luar negeri berkorelasi positif terhadap pertumbuhan ekonomi nasional.

Hutang dalam bahasa Arab adalah *ad Dayn* yaitu sesuatu yang berada dalam tanggung jawab orang lain. *Dayn* disebut juga dengan *wasfu al-dzimmah* (sesuatu yang mesti dilunasi atau diselesaikan) sehingga hutang negara adalah milik rakyat dan digunakan untuk keperluan rakyat. Selain itu, *ad Dayn* secara bahasa juga dapat bermakna pinjaman.²¹

Secara umum terdapat dua pandangan terkait hutang negara dalam perspektif ekonomi Islam:²²

¹⁸ Lilik Rahmawati, "Kebijakan Fiskal dalam Islam", *Al-Qanun*, Vol. 11, No. 2, (Desember 2008), hlm. 444.

¹⁹ Dedi Junaedi, hlm. 565.

²⁰ Syaparuddin, dkk, "Pengaruh Hutang Luar Negeri terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia, Thailand, Malaysia, Philipina, Vietnam dan Burma Periode 1990-2013, *Jurnal Paradigma Ekonomika*, Vol. 10, No. 01, (April 2015), hlm. 208.

²¹ Faisol Luthfi, "Hutang Luar Negeri Indonesia Ditinjau dari Perspektif Ekonomi Islam", *EQUILIBRIUM: Jurnal Ekonomi Syariah*, Vol. 6, No. 2, (Tahun 2018), hlm. 168.

²² *Ibid*, hlm. 170.

Tabel 2.3 Pandangan Islam Terhadap Hutang Luar Negeri

Pro Hutang (<i>External Financing</i>)	Kontra Hutang (<i>External Financing</i>)
Boleh sepanjang bentuk dan mekanisme sesuai dengan syariat.	Tidak boleh menutup <i>budget deficit</i> dengan hutang luar negeri.
Latar belakang: Konsep dan fakta historis bahwa kerjasama dengan pihak lain dalam satu usaha diperbolehkan, bahkan dianjurkan. Bentuk kerjasama dalam Islam seperti <i>murabahah</i> , <i>mudharabah</i> , <i>musyarakah</i> dapat dikembangkan sebagai <i>external financing</i> dan juga bentuk-bentuk ini lebih ke arah <i>creating equity</i> .	Latar belakang: Tendensinya ke arah faktual dan preventif, di mana keterlibatan negara-negara Islam dalam hutang luar negeri pasti akan bersentuhan dengan riba.

Sumber: Faishol Luthfi, 2018

Berdasarkan teori tersebut di atas, maka lahir hipotesis tiga, yaitu:

H3 : Hutang Luar Negeri mempunyai pengaruh positif terhadap Pertumbuhan Ekonomi

Pembiayaan Syariah

Dalam UU Nomor 10 Tahun 1998 disebutkan bahwa pembiayaan berdasarkan prinsip syariah adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.²³

Sektor keuangan memainkan peran penting dalam mendorong pertumbuhan berbagai sektor ekonomi. Ini dikarenakan lembaga perbankan mampu memobilisasi surplus modal dari pihak ketiga untuk diinvestasikan ke berbagai sektor ekonomi yang membutuhkan pembiayaan. Ketika sektor keuangan bertumbuh secara baik maka akan semakin banyak sumber pembiayaan yang dapat dialokasikan ke sektor-sektor produktif dan akan semakin bertambah pembangunan fisik modal yang bisa diciptakan, di mana nantinya akan berkontribusi positif terhadap pertumbuhan ekonomi.

Lazimnya dalam pembiayaan berdasarkan prinsip syariah, ada tiga skim dalam melakukan akad pada bank syariah adalah sebagai berikut:

1. Pembiayaan bagi hasil berdasarkan prinsip *mudharabah* dan prinsip *musyarakah*.
2. Pembiayaan jual beli berdasarkan prinsip *murabahah*, prinsip *istishna'* dan prinsip *salam*.
3. Pembiayaan sewa-menyewa berdasarkan prinsip *ijarah* (sewa murni) dan *ijarah al-muntahiya bit-tamlik* (sewa beli atau sewa dengan hak opsi).²⁴

Berdasarkan teori tersebut di atas, maka lahir hipotesis empat, yaitu:

²³ Rahma Ilyas, "Konsep Pembiayaan dalam Perbankan Syariah", *Jurnal Penelitian*, Vol. 9, No. 1, (Februari 2015), hlm. 186.

²⁴ Rahmat Ilyas, hlm. 190.

H4 : Pembiayaan Syariah mempunyai pengaruh positif terhadap Pertumbuhan Ekonomi

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini, paradigma yang digunakan adalah paradigma Profetik, yaitu proses pengilmuan ayat-ayat al-Qur'an. Kaitannya dengan penjelasan tersebut dalam penelitian ini, yaitu mencoba mengumpulkan data ekonomi yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik, Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan dan publikasi lainnya yang kemudian diuji secara statistik menggunakan alat uji *eviews 10* yang kemudian di bedah dalam bingkai keIslaman, yakni memasukkan sub-sub keIslaman dalam analisisnya dalam rangka penselarasan keilmuan umum dan teori Islam seperti yang terkandung dalam nilai-nilai profetik.

Adapun metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah *Error Correction Model (ECM)*, yaitu bertujuan untuk mengestimasi pengaruh jangka panjang dan pengaruh jangka pendek variabel inflasi, pengeluaran konsumsi pemerintah, hutang luar negeri dan pembiayaan syariah terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Model tersebut selengkapnya disajikan, sebagai berikut:

1. Bentuk persamaan ECM untuk estimasi jangka panjang:

$$PE_t = \alpha_0 + \alpha_1 INF_t + \alpha_2 PKP_t + \alpha_3 HLN_t + \alpha_4 PS_t \dots (2)$$

Keterangan:

- PE_t : Pertumbuhan Ekonomi periode t
 INF_t : Inflasi periode t
 PKP_t : Pengeluaran Konsumsi Pemerintah periode t
 HLN_t : Hutang Luar Negeri periode t
 PS_t : Pembiayaan Syariah periode t
 $\alpha_0 \alpha_1 \alpha_2 \alpha_3 \alpha_4$: Koefisien Jangka Panjang

2. Bentuk persamaan ECM untuk estimasi jangka pendek adalah sebagai berikut:

$$DPE_t = \alpha_1 DINF_t + \alpha_2 DPKP_t + \alpha_3 DHLN_t + \alpha_4 DPS_t RES(-1) \dots (2)$$

Keterangan:

- DPE_t : Perubahan Pertumbuhan ekonomi Periode t
 $DINF_t$: Perubahan Inflasi Periode t
 $DPKP_t$: Perubahan Pengeluaran Konsumsi Pemerintah Periode t
 $DHLN_t$: Perubahan Hutang Luar Negeri Periode t
 DPS_t : Perubahan Pembiayaan Syariah Periode t
 $\alpha_0 \alpha_1 \alpha_2 \alpha_3 \alpha_4$: Koefisien Jangka Pendek

Kriteria pengujian *Error Correction Model (ECM)*:

1. H_0 : Ada pengaruh
 H_a : Tidak ada pengaruh
2. Tingkat signifikansi 95% atau $\alpha = 5\%$
3. Statistik uji : *Error Correction Model (ECM)*
4. Daerah kritis : H_0 ditolak jika nilai Probabilitas > Critical Value ($\alpha = 5\%$)
5. Kesimpulan: H_0 diterima karena nilai Probabilitas < Critical Value ($\alpha = 5\%$)

Untuk terpenuhinya model ECM di atas, maka harus lolos dalam uji pra syarat penelitian, antara lain:

1. Uji Akar Unit (*Unit Root Test*)

Konsep yang dipakai untuk menguji stasioner suatu data runtut waktu adalah uji akar unit. Apabila suatu data runtut waktu bersifat tidak stasioner, maka dapat dikatakan bahwa data tersebut tengah menghadapi persoalan akar unit (*unit root problem*).²⁵

Untuk menentukan apakah data stasioner atau tidak, bisa dilakukan menggunakan uji akar unit dengan metode *Dickey-Fuller (Dickey-Fuller test)* yaitu salah satu cara yang digunakan untuk mendeteksi apakah data stasioner pada level atau *diffrence*. Data dikatakan stasioner apabila nilai probabilitas pada *Dickey-Fuller test* lebih kecil dari 0,05. Apabila nilai probabilitas lebih besar dari 0,05 maka dapat disimpulkan bahwa data tidak stasioner.

2. Uji Kointegrasi

Pengujian kointegrasi antar variabel bertujuan untuk melihat hubungan atau keseimbangan jangka panjang pada variabel bebas terhadap variabel terikat. Untuk menguji adanya kointegrasi dapat dilakukan dengan menggunakan metode uji *Engle-Granger* dan langkah uji *Johansen*. Namun dalam penelitian ini hanya menggunakan uji *Engle-Granger*.

Berikut persamaan kointegrasi dalam penelitian ini, yaitu:

$$PE_t = \alpha_0 + \alpha_1 \Delta INF_t + \alpha_2 PKP_t + \alpha_3 HLN_t + \alpha_4 PS_t + e_t \dots (1)$$

Keterangan:

- PE_t : Pertumbuhan Ekonomi Periode t
 INF_t : Inflasi Periode t
 PKP_t : Pengeluaran Konsumsi Pemerintah periode t
 HLN_t : Hutang Luar Negeri Periode t
 PS_t : Pembiayaan Syariah Periode t
 $\alpha_0 \alpha_1 \alpha_2 \alpha_3 \alpha_4$: Koefisien Kointegrasi

Kriteria uji kointegrasi data:

- H_0 : Ada kointegrasi
 H_a : Tidak ada kointegrasi
 - Tingkat signifikansi 95% atau $\alpha = 5\%$
 - Statistik uji : nilai ADF
 - Daerah kritis : H_0 ditolak jika nilai ADF > Critical Value ($\alpha = 5\%$)
 - Kesimpulan: H_0 diterima karena nilai ADF < Critical Value ($\alpha = 5\%$)
3. Uji Asumsi Klasik

Pengujian ini dilakukan untuk mengetahui ada tidaknya penyimpangan asumsi klasik dari hasil penelitian dalam persamaan regresi yang meliputi uji normalitas, uji heteroskedastisitas, uji autokorelasi, dan uji multikolinearitas.

²⁵ Agus Tri Basuki, *Analisis Regresi dalam Penelitian Ekonomi & Bisnis (Dilengkapi Aplikasi SPSS & Eviews)*, (Yogyakarta: RajaGrafindo Persada, 2016), hlm. 5..

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

1. Uji Prasyarat Penelitian

Dalam pengujian Akar Unit pada tingkat level hanya variabel Inflasi yang stasioner. Sedangkan variabel Pertumbuhan Ekonomi, Pengeluaran Konsumsi Pemerintah, Hutang Luar Negeri dan Pembiayaan Syariah tidak stasioner. Oleh karena itu, untuk keperluan regresi ECM maka perlu dilakukan proses diferensiasi terhadap data tersebut agar data stasioner pada derajat yang sama. Dengan prosedur yang sama seperti langkah di atas maka hasil uji akar-akar unit *Augmented Dickey Fuller* (ADF) test pada derajat *first difference* menunjukkan bahwa semua data telah stasioner pada derajat yang sama yaitu *first difference*.

Selanjutnya pengujian prasyarat Kointegrasi data, diketahui bahwa *residual* pada persamaan jangka panjang sudah signifikan pada derajat level karena ADF statistik secara absolut lebih besar dari pada *critical value* baik pada 1%, 5% maupun 10% atau dilihat dari probabilitasnya adalah 0,0046 atau lebih kecil dari 0,05. Hal ini berarti *residual* tidak mengandung akar-akar unit sehingga pemodelan ECM dalam jangka panjang diestimasi menggunakan regresi OLS dengan *evIEWS* 10.

Begitu juga pada pengujian Asumsi Klasik yang terdiri dari uji normalitas, heteroskedastisitas, autokorelasi, dan multikolinearitas. Berdasarkan uji yang telah dilakukan, maka penelitian ini disimpulkan terbebas dari masalah asumsi klasik.

2. Error Correction Model (ECM)

Tabel 1. Hasil Estimasi Model ECM Jangka Panjang

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	0.000307	0.000348	0.882926	0.3851
Hutang Luar Negeri	-0.001108	0.000428	-2.590959	0.0152
Inflasi	-0.124837	0.148738	-0.839307	0.4087
Pembiayaan Syariah	-0.006860	0.001201	-5.713453	0.0000
C	7.152866	0.219908	32.52660	0.0000
R-squared	0.729081			
Adjusted R-squared	0.688945			
F-statistic	18.16523			
Prob(F-statistic)	0.000000			

Sumber: Data diolah, *EvIEWS* 10, 2019

Berdasarkan tabel 1 maka diperoleh model ECM jangka panjang sebagai berikut:

$$\begin{aligned} PE_t &= \alpha_0 + \alpha_1 INF_t + \alpha_2 PKP_t + \alpha_3 HLN_t + \alpha_4 PS_t \\ &= 7,152866_C - 0,001108_INF + 0,000307_PKP - 0,001108_HLN - 0,006860_PS \end{aligned}$$

Berdasarkan hasil analisis, dapat dibuat persamaan regresi sebagai berikut:

- Konstanta sebesar 7,152866 artinya jika nilai Inflasi, Pengeluaran Konsumsi Pemerintah, Hutang Luar Negeri dan Pembiayaan Syariah dalam jangka panjang = 0, maka besarnya pertumbuhan ekonomi adalah 7,152866.

- b. Koefisien variabel Inflasi sebesar $-0,124837$, di mana jika nilai koefisien bernilai negatif maka artinya inflasi mempunyai pengaruh negatif terhadap pertumbuhan ekonomi. Jika inflasi naik 1 persen akan menurunkan pertumbuhan ekonomi sebesar $0,124837$, sebaliknya jika tingkat inflasi turun sebesar 1 persen akan menaikkan pertumbuhan ekonomi sebesar $0,124837$.
- c. Koefisien Pengeluaran Konsumsi Pemerintah sebesar $0,000307$, artinya jika pengeluaran konsumsi pemerintah meningkat 1 persen maka akan menurunkan pertumbuhan ekonomi sebesar $0,000307$ dan sebaliknya jika pengeluaran konsumsi pemerintah menurun 1 persen maka akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi sebesar $0,000307$. Tidak berpengaruhnya Pengeluaran Konsumsi Pemerintah dapat dilihat dari nilai probabilitas sebesar $0,3851$ (data tidak signifikan $>0,05$).
- d. Koefisien Hutang Luar Negeri sebesar $-0,001108$ yang di mana karena nilai koefisien bertanda negatif maka artinya pengaruh yang diberikan adalah negatif. Artinya apabila hutang luar negeri meningkat sebesar 1 persen akan menurunkan pertumbuhan ekonomi sebesar $0,001108$, sebaliknya apabila hutang luar negeri menurun 1 persen maka akan menaikkan pertumbuhan ekonomi sebesar $0,001108$.
- e. Koefisien Pembiayaan Syariah sebesar $-0,006860$, karena nilai koefisien bertanda negatif maka pengaruh yang diberikan pembiayaan syariah adalah negatif. Artinya apabila pembiayaan syariah meningkat sebesar 1 persen maka akan menurunkan pertumbuhan ekonomi sebesar $0,006860$ dan apabila pembiayaan syariah menurun 1 persen maka akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi sebesar $0,001108$.
- f. Nilai Adjusted R-squared adalah sebesar $0,688945$ yang artinya variabel inflasi, pengeluaran konsumsi pemerintah, hutang luar negeri, dan pembiayaan syariah dalam penelitian ini mampu menjelaskan variabel dependen sebesar $68,89$ persen. Sedangkan sisanya $31,11$ persen adalah variabel lain di luar model. Nilai probabilitas F-statistik sebesar $0,000000$ menunjukkan bahwa variabel independen dalam dalam jangka panjang seperti inflasi, pengeluaran konsumsi pemerintah, hutang luar negeri, dan pembiayaan syariah berpengaruh secara bersama-sama terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia.

Tabel 2. Hasil Estimasi Model ECM Jangka Pendek

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-0.015050	0.045612	-0.329958	0.7467
D(Inflasi)	0.053583	0.044114	1.214633	0.2461
D(Pengeluaran Konsumsi Pemerintah)	0.000200	0.000129	1.540977	0.1473
D(Hutang Luar Negeri)	0.006415	0.002180	2.941941	0.0114
D(Pembiayaan Syariah)	4.73E-05	0.004196	0.011281	0.9912
ECT(-1)	-0.538221	0.120958	-4.449653	0.0007
R-squared	0.897247			
Adjusted R-squared	0.857727			
F-statistic	22.70342			
Prob(F-statistic)	0.000005			

Sumber: Data diolah, Eviews 10, 2019

Berdasarkan tabel 2 maka diperoleh model ECM jangka pendek sebagai berikut:

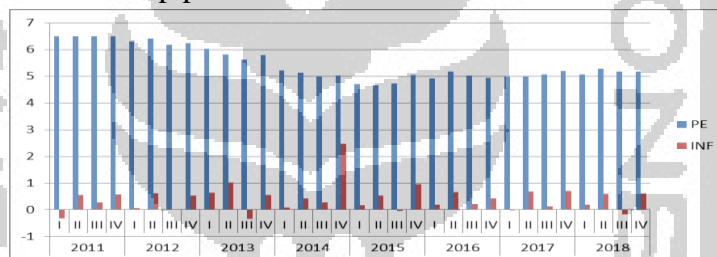
$$\begin{aligned} DPE_t &= \alpha_1 DINF_t + \alpha_2 DPKP_t + \alpha_3 DHLN_t + \alpha_4 DPS_t ECT(-1) \\ &= -0,015050_C + 0,053583_DINF + 0,000200_DPKP + 0,006415_DHLN + \\ &\quad 0,47305_DPS (-0,538221)_ECT \end{aligned}$$

Berdasarkan hasil analisis, dapat dibuat persamaan regresi sebagai berikut:

- a. Konstanta sebesar -0,015050 menunjukkan angka negatif. Ini memberikan makna bahwa tanpa pergerakan tingkat inflasi, intervensi pemerintah dalam bentuk pengeluaran pemerintah, hutang luar negeri, dan pengalokasian pembiayaan pada bank syariah dalam jangka pendek maka pertumbuhan ekonomi cenderung tertekan.
- b. Koefisien variabel Inflasi sebesar 0.053583 berarti apabila inflasi meningkat 1 persen maka akan menaikkan pertumbuhan ekonomi sebesar 0.053583.
- c. Koefisien Pengeluaran Konsumsi Pemerintah sebesar 0,000200, berarti apabila pengeluaran konsumsi pemerintah meningkat 1 persen maka akan menurunkan pertumbuhan ekonomi sebesar 0,000200 dan apabila pengeluaran konsumsi pemerintah menurun 1 persen maka akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi sebesar 0,000200. Tidak adanya pengaruh yang diberikan Pengeluaran Konsumsi Pemerintah dapat dilihat pada nilai probabilitas yang tidak signifikan sebesar 0,1473.
- d. Koefisien Hutang Luar Negeri sebesar 0,006415, yaitu apabila hutang luar negeri meningkat 1 persen maka akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi sebesar 0,006415 dan apabila hutang luar negeri menurun 1 persen maka akan menurunkan pertumbuhan ekonomi sebesar 0,006415.
- e. Koefisien Permbiayaan Syariah sebesar 4,7305 berarti apabila pembiayaan syariah meningkat 1 persen maka akan menurunkan pertumbuhan ekonomi sebesar 4,7305. Sebaliknya apabila pembiayaan syariah menurun 1 persen maka akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi sebesar 4,7305. Tidak adanya pengaruh yang diberikan Pengeluaran Konsumsi Pemerintah dapat dilihat pada nilai probabilitas yang tidak signifikan sebesar 0,9912.
- f. Koefisien variabel ECT (*Error Correction Term*) yaitu sebesar -0,538221 yang mempunyai makna bahwa perbedaan antara tingkat pertumbuhan dengan nilai 1 tahun.
- g. Nilai *Adjusted R-squared* sebesar 0,857727 yang mempunyai arti bahwa sebesar 85,77 persen variasi variabel pertumbuhan ekonomi secara bersama-sama dapat dijelaskan oleh variabel bebas yang terdiri dari inflasi, pengeluaran konsumsi pemerintah, hutang luar negeri, dan pembiayaan syariah. Sedangkan sisanya sebesar 14,23 persen dijelaskan oleh variabel-variabel lain di luar model. Nilai probabilitas F-statistik sebesar 0,000005 atau lebih kecil dari 0,05. Sehingga disimpulkan bahwa variabel independen secara bersama-sama berpengaruh terhadap tingkat pertumbuhan ekonomi.

Pembahasan

Laju inflasi Indonesia selama periode 2011-2018 secara umum berfluktuasi, tetapi terkendali. Angka inflasi selama tahun 2011-2018 tergolong masih rendah dan di bawah rata-rata tingkat inflasi 10 persen per tahun, maka inflasi tersebut merupakan inflasi ringan. Inflasi Indonesia yang terkendali tidak hanya dipengaruhi oleh faktor siklikal, tetapi juga oleh faktor struktural. Satu sisi, faktor siklikal seperti harga komoditas pangan global yang menurun dan permintaan yang terkendali mempengaruhi tekanan inflasi yang terus terkendali. Sisi lain, perbaikan struktural karakter inflasi Indonesia juga berpengaruh positif dan menimbulkan dampak permanen pada inflasi yang makin rendah. Faktor struktural tersebut terkait kebijakan moneter yang konsisten, struktur pasar yang kompetitif dan informasi pasar yang makin baik, serta distribusi dan logistik barang yang lebih lancar. Selain itu, koordinasi dengan Pemerintah pusat dan daerah yang makin erat juga berkontribusi pada perbaikan karakter inflasi tersebut. Perbaikan struktur inflasi pada gilirannya mempengaruhi perilaku inflasi seperti ekspektasi yang semakin rendah, dampak lanjutan kenaikan inflasi VF dan AP terhadap inflasi inti yang makin rendah, serta dampak pelemahan kurs terhadap inflasi yang menurun sehingga hal tersebut memberikan dampak positif terhadap perekonomian di Indonesia.²⁶



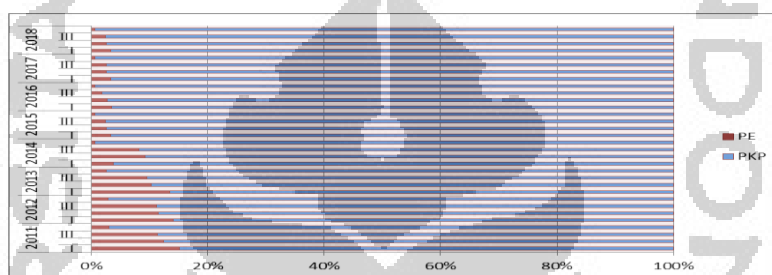
Gambar 4.7 Perkembangan Tingkat Inflasi dan Pertumbuhan Ekonomi
Sumber: BI, BPS dan publikasi lainnya diolah

Terkendalnya tingkat inflasi memberi dampak positif bagi perekonomian, seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya inflasi yang terkontrol akan mendorong para pengusaha untuk meningkatkan jumlah produksinya. Ketika produksi ditambah, jelas akan membuka lowongan pekerjaan baru bagi masyarakat. Bertambahnya faktor produksi akan merangsang jumlah *output* yang dihasilkan oleh perusahaan, di mana *output* bertambah maka pertumbuhan ekonomi juga meningkat. Sebaliknya jika inflasi yang terlalu tinggi menyebabkan ketidakstabilan perekonomian negara, yaitu penurunan daya beli masyarakat dan ketidakmampuan para produsen atau industri dalam memenuhi faktor produksi mereka dikarenakan harga-harga yang tidak terkendali. Penurunan tingkat produksi juga menurunkan pertumbuhan ekonomi dalam negeri.

Permasalahan inflasi seperti yang disebutkan di atas juga diakui oleh ekonomi Islam dan salah satu penyebab inflasi yang disebutkan oleh Al-Maqrizi adalah *human error inflation* atau inflasi karena kesalahan manusia. Di antara kesalahan yang dilakukan oleh manusia yaitu korupsi dan administrasi yang buruk. Buruknya administrasi dapat dilihat pada krisis yang melanda Indonesia pada tahun 1998. Kekacauan politik di Indonesia berimplikasi pada peningkatan harga-harga dalam sektor ekonomi yang dampaknya pada penurunan ekonomi di

²⁶ Bank Indonesia, *Laporan Perekonomian Indonesia 2018*, (Jakarta: Bank Indonesia, 2018), hlm. 62.

berbagai sektor. Sebelum krisis ekonomi tahun 1998, tingginya inflasi (*hyper inflation*) yang menimpa Indonesia juga terjadi tahun 1997-an merupakan krisis moneter yang tidak terlepas dari ulah spekulasi mata uang di bursa valas. Akibat adanya spekulasi di bursa valas, nilai tukar rupiah terdepresiasi terhadap dolar AS. Sehingga bagi negara yang banyak memiliki hutang luar negeri, terjadinya depresiasi nilai tukar ini akan lebih membahayakan ekonominya. Dengan demikian, jika kita merujuk kembali kepada al-Qur'an dan Sunnah, maka faktor-faktor utama yang dapat menyebabkan terjadinya gejolak nilai mata uang harus ditekan seminimal mungkin sebagaimana yang dikehendaki oleh al-Qur'an dan Sunnah. Sehingga keberadaan transaksi valuta asing yang dilakukan secara tidak kontan dan tidak berada di tempat seharusnya segera dihilangkan, sebab kenyataannya praktik tersebut lebih menumbuhsuburkan spekulasi yang berujung pada terjadinya guncangan nilai tukar mata uang, di mana dampaknya dapat menghancurkan ekonomi sektor *rill* yang ditandai dengan tingginya inflasi.²⁷



Gambar 4.9 Perkembangan Pengeluaran Konsumsi Pemerintah dan Pertumbuh Ekonomi
Sumber: BPS dan publikasi lainnya diolah.

Gambar 4.9 di atas menunjukkan bahwa kontribusi yang diberikan pengeluaran konsumsi pemerintah terhadap pertumbuhan ekonomi masih rendah. Dilihat dari tahun 2011 hingga tahun 2018 kontribusi yang diberikan cenderung menurun yang digambarkan oleh grafik berwarna merah. Dalam publikasi The World Bank (2016) menegaskan bahwa anggaran belanja pemerintah seharusnya dikelola melalui kebijakan prioritas seperti: peningkatan anggaran kesehatan dan kelanjutan pendanaan pendidikan, investasi lebih besar pada infrastruktur, dan peningkatan cakupan bantuan sosial, manfaat dan jaminan sosial untuk semua orang.

Namun menariknya perekonomian yang ditopang oleh impor memiliki jumlah yang lebih tinggi dibanding jumlah ekspor. Tercatat pada tahun 2018 jumlah ekspor Indonesia sebesar 180.059,2 juta dolar AS atau sekitar 609.291,7 ton. Sementara total impor Indonesia pada tahun 2018 mencapai 188.625,6 juta dolar AS atau 171.623,0 ton. Angka tersebut menunjukkan, jumlah barang masuk ke Indonesia lebih banyak dibanding *output* yang dihasilkan di dalam negeri. Impor yang tinggi akan memberi dampak negatif bagi perekonomian dalam negeri. Ini disebabkan devisa negara akan berkurang karena pemerintah harus membayar kepada negara eksportir termasuk membayar pajak impor.

Secara khusus, permasalahan yang juga dialami dalam pengeluaran konsumsi pemerintah yaitu terkait belanja publik untuk bantuan sosial (kurang dari 1% PDB) masih sangat rendah, bahkan jika dibandingkan negara berpenghasilan menengah lainnya (1,4% di India; 2,1% di

²⁷ Kuni Zakiyah, "Peran Pengendalian Inflasi dalam Tinjauan Perspektif Al-Qur'an", *The International Journal Of Applied Business (TIJAB)*, Vol. 2, No. 1, (April 2018), hlm. 26-27.

Cina; 2,8% di Brazil; dan 3,1% di Afrika Selatan), sementara kemiskinan masih relatif banyak dijumpai. Keadaan ini menjustifikasi perluasan skema bantuan tunai bersyarat, termasuk mengganti program bantuan langsung tunai (tanpa syarat) yang ada, yang cenderung berkotak-kotak dan tidak mencapai sasaran dengan baik.²⁸

Permasalahan bantuan sosial, Islam menegaskan dalam Qur'an surat Al-Hasyr ayat 7, yaitu:

مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَىٰ فَلِلَّهِ وَاللرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٧﴾

Artinya: “Apa saja harta rampasan (fai-i) yang diberikan Allah kepada Rasul-Nya yang berasal dari penduduk kota-kota maka adalah untuk Allah, untuk Rasul, kerabat Rasul, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan, supaya harta itu jangan hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu. Apa yang diberikan Rasul kepadamu, maka terimalah. Dan apa yang dilarang bagimu, maka tinggalkanlah; dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah sangat keras hokum-Nya”. (Q.S. Al-Hasyr: 7)²⁹

Ayat tersebut secara tersurat menyinggung terkait belanja negara, bahwa pendapatan negara harus didistribusikan secara merata, sehingga tercipta keadilan di tengah masyarakat. Oleh karena itu, permasalahan bantuan sosial harus menjadi perhatian pemerintah sehingga terwujud kemakmuran yang sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam. Bantuan sosial yang dialokasikan oleh pemerintah bisa menjadi lumbung modal bagi masyarakat dalam membangun roda perekonomian, yang misalnya adalah untuk membuka usaha. Semakin besar kontribusi usaha yang diberikan oleh sektor-sektor ekonomi akan membantu mempercepat pertumbuhan ekonomi nasional.

Secara umum, posisi hutang Indonesia masih dapat dikatakan aman, yaitu di mana rasio-rasio hutang pemerintah yang merujuk pada standar *Maastricht Treaty* (rasio hutang terhadap PDB) dan rasio jumlah hutang terhadap jumlah penduduk) dinilai dapat menjaga hutang pemerintah dalam batas yang masih dapat dikelola dengan baik (*manageable*) dan menjamin kesinambungan fiskal. Dibanding dengan beberapa negara berkembang seperti Turki, Filipina, Thailand, Malaysia dan Brazil, dilihat dari statistik Indonesia mempunyai rasio hutang paling rendah yaitu 28,5% terhadap PDB. Sedangkan paling tinggi adalah negara Brazil mencapai 81,2%.

Merujuk pada APBN tahun 2018 menggambarkan penurunan subsidi energi sebesar - 73,0% dialihkan pada peningkatan anggaran sektor produktif seperti infrastruktur sebesar 165,3%, kesehatan 85,9%, dan pendidikan 25,7%. Pembiayaan untuk infrastruktur memiliki jumlah paling tinggi dalam catatan hutang pemerintah, karena difokuskan untuk mendanai

²⁸ *Ibid.*

²⁹ Tim Penerjemah Al-Qur'an Departemen Agama Republik Indonesia Jakarta, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Semarang: PT. Kumudasmoro Grafindo Semarang, 1994), hlm. 916.

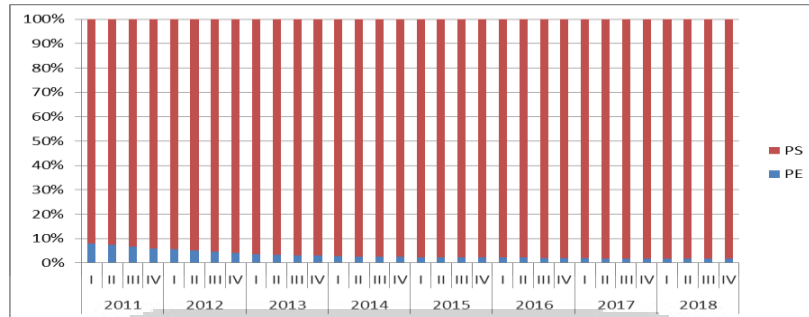
beberapa proyek seperti proyek jalan tol, pembangunan jembatan, proyek infrastruktur perkotaan, bandara, proyek perumahan, pembuatan bendungan, dan proyek lainnya yang tercatat sebagai hutang jangka panjang. Akan tetapi hasil penelitian ini menunjukkan hutang luar negeri yang berjangka panjang tidak memberi dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi. Meskipun terdapat sejumlah kajian yang menolaknya, beberapa penelitian juga menyatakan hasil yang sama. Hal ini dikarenakan pembangunan infrastruktur oleh Pemerintah masih bersifat statis, yaitu penggunaan infrastruktur lebih besar untuk mengangkut barang-barang hasil impor. Artinya sarana transportasi yang telah dibangun lebih besar penggunaannya untuk memperlancar distribusi barang-barang yang masuk ke Indonesia. Seharusnya pembangunan infrastruktur oleh Pemerintah bersifat dinamis, yaitu merangsang sektor industri dalam negeri. Jika industri dalam negeri berkembang maka pertumbuhan ekonomi juga meningkat.

Fakta-fakta di atas memberikan gambaran bahwa hutang luar negeri yang dilakukan oleh pemerintah belum mampu menjadi faktor *leverage* bagi perekonomian Indonesia dan tidak menciptakan masalah. Salah satu alternatif yang ditawarkan oleh Islam dan sebenarnya telah diterapkan oleh pemerintah namun belum maksimal, yaitu pembiayaan dalam bentuk sukuk. Penerbitan sukuk oleh negara pada tahun 2008 menjadi sebuah era baru dalam pengelolaan pembiayaan sekaligus memperkaya instrument fiskal yang dimiliki oleh pemerintah. Seiring berjalannya waktu, peran sukuk oleh negara sebagai instrument fiskal juga semakin meningkat. Hal ini dapat dilihat dari jumlah penerbitan Sukuk Negara yang terus mengalami tren peningkatan. Pada tahun 2008 penerbitan sukuk oleh negara hanya senilai 4,7 triliun rupiah. Pada tahun 2012 meningkat menjadi 57,09 triliun rupiah dan pada tahun 2014 menjadi 75,54 triliun rupiah.³⁰

Saat ini penerbitan Sukuk Negara tidak hanya untuk pembiayaan defisit umum APBN, tetapi lebih diarahkan untuk pembiayaan proyek infrastruktur. Hal ini bukan saja sejalan dengan program Kabinet Kerja, tetapi juga sejalan dengan tujuan (*maqashid*) keuangan syariah yang turut menjadi pendorong berkembangnya sektor *rill* dan memberi *multiplier effect* bagi pertumbuhan ekonomi.³¹ Oleh karena itu, pemerintah harus menekan jumlah hutang luar negeri dengan memperbesar investasi di dalam negeri, yaitu melalui penerbitan Surat Berharga Negara (SBN)/Sukuk Negara yang tujuannya untuk menggaet para investor di dalam negeri sehingga potensi dana yang ada di dalam negeri teralokasikan dengan baik dan dapat mengurangi ketergantungan pada hutang luar negeri.

³⁰ Muhammad Ardi, "Pengaruh Sukuk Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia", *IQTISHADUNA*, Vol. IX, No. 1, (Juni 2018), hlm. 86.

³¹ *Ibid.*



Gambar 4.10 Perkembangan Pembiayaan Syariah dan Pertumbuhan Ekonomi
Sumber: OJK dan publikasi lainnya diolah

Berdasarkan gambar 4.10 di atas dapat dilihat nominal kontribusi yang mampu diberikan oleh bank syariah relatif kecil. Terlihat pada gambar di atas adanya fenomena perlambatan pertumbuhan volume usaha dalam perkembangan di tiga tahun terakhir sehingga pada akhir tahun 2014 hanya mencatat pertumbuhan sebesar 12%.

Rendahnya kontribusi pembiayaan syariah terhadap pertumbuhan ekonomi disebabkan karena fokus pembiayaan lebih banyak untuk aktivitas konsumsi bukan untuk aktivitas yang produktif. Dapat dilihat dari total pembiayaan pada bank syariah, yaitu pembiayaan *murabahah* mempunyai total paling tinggi dibanding *mudharabah* dan *musyarakah*. Hal ini tercermin dari laporan perbankan syariah, yaitu sebagai berikut:

Tabel 4.13 Pembiayaan Berdasarkan Jenis Akad

(Dalam Miliar Rupiah)

Tahun	Jenis Akad Pembiayaan						
	<i>Mudharabah</i>	<i>Musyarakah</i>	<i>Murabahah</i>	<i>Qard</i>	<i>Istishna'</i>	<i>Ijarah</i>	<i>Salam</i>
2011	10.229	18.960	56.365	12.937	326	3.839	0
2012	12.023	27.667	88.004	12.090	376	7.345	0
2013	13.625	39.874	110.565	8.995	582	10.481	0
2014	14.354	49.387	117.371	5.965	633	11.620	0
2015	14.820	60.713	122.111	3.951	770	10.631	0
2016	15.292	78.421	139.536	4.731	878	9.150	0
2017	17.090	101.561	150.276	6.349	1.189	9.230	0
2018	15.866	129.641	154.805	7.674	1.609	10.597	0

Sumber: OJK, Statistik Perbankan Syariah, 2011-2018

Secara umum perbankan syariah mengalami pertumbuhan yang cukup pesat, akan tetapi dari sisi ukuran industri dan dampaknya terhadap perekonomian nasional masih relatif kecil ketika dibandingkan dengan industri perbankan dan keuangan umum, yang terlihat dari pangsa pasar maupun rasio pembiayaan syariah terhadap GDP yang masih kecil. Namun mengingat potensi perbankan dan keuangan syariah yang masih beredar di Indonesia sebagai negara berpenduduk muslim terbesar di dunia yang memiliki sumber daya alam yang cukup serta sebagai anggota G20, perbankan syariah Indonesia mempunyai potensi untuk berkontribusi lebih signifikan dalam mendukung perekonomian nasional dan meningkatkan kesejahteraan sekaligus pemerataan pembangunan nasional.³²

³² Departemen Perbankan Syariah, *Roadmap Perbankan Syariah Indonesia 2015-2019*, (Jakarta: Otoritas Jasa Keuangan Syariah, 2019), hlm. 15.

PENUTUP

Kesimpulan

Dari hasil pengujian mengenai factor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan yaitu sebagai berikut:

1. Hasil penelitian ini menunjukkan tingkat Inflasi secara parsial dalam jangka panjang memiliki pengaruh negatif terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia, dengan nilai probabilitas sebesar 0,4087 dan koefisien sebesar -0,124837. Sedangkan dalam jangka pendek tingkat Inflasi memberikan pengaruh positif terhadap Pertumbuhan Ekonomi, yaitu dengan nilai probabilitas sebesar 0,2461 dan koefisien sebesar 0,053583.
2. Secara parsial Pengeluaran Konsumsi Pemerintah baik dalam jangka panjang maupun jangka pendek tidak berpengaruh positif terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia. Kesimpulan ini diambil dengan melihat nilai probabilitas jangka panjang sebesar 0,3851 dan probabilitas jangka pendek sebesar 0,2461, dengan nilai koefisien masing-masing sebesar 0,000307 dalam jangka panjang dan 0,000200 dalam jangka pendek.
3. Berdasarkan hasil uji yang telah dilakukan oleh penulis juga disimpulkan bahwa Hutang Luar Negeri secara parsial dalam jangka panjang tidak berpengaruh positif terhadap Pertumbuhan Ekonomi. Hasil ini diperoleh dari nilai probabilitas sebesar 0,0152 dengan koefisien sebesar -0,001108. Sedangkan dalam jangka pendek Hutang Luar Negeri berpengaruh positif terhadap Pertumbuhan Ekonomi, dengan perolehan nilai probabilitas sebesar 0,0114 dan koefisien sebesar 0,006415.
4. Adapun Pembiayaan Syariah diketahui secara parsial baik dalam jangka panjang maupun jangka pendek memiliki pengaruh negatif terhadap Pertumbuhan Ekonomi. Hasil ini diperoleh dari nilai probabilitas Pembiayaan Syariah dalam jangka panjang sebesar 0,0000 dengan koefisien negatif sebesar -0,006860. Sedangkan nilai probabilitas jangka pendek sebesar 0,9912 dan koefisien sebesar 4,7305.
5. Secara simultan (bersama-sama) disimpulkan baik dalam jangka panjang maupun jangka pendek variabel Inflasi, Pengeluaran Konsumsi Pemerintah, Hutang Luar Negeri dan Pembiayaan Syariah mempunyai pengaruh positif terhadap Pertumbuhan Ekonomi Nasional. Hasil tersebut diperoleh dari nilai probabilitas F-statistik jangka panjang sebesar 0,000000 dan jangka pendek sebesar 0,000005.

Saran

Berdasarkan hasil analisis dan penelitian maka saran yang dapat diberikan penulis adalah sebagai berikut:

1. Untuk menjaga kestabilan perekonomian, pemerintah diharapkan dapat mengeluarkan regulasi atau kebijakan yang bisa mengontrol tingkat inflasi, karena inflasi yang terlalu tinggi berpengaruh negatif terhadap pertumbuhan ekonomi.
2. Pengeluaran Pemerintah mempunyai andil besar dalam menggerakkan sektor perekonomian dalam negeri, sehingga peran Pemerintah dalam bidang pembangunan khususnya pada modal fisik dan modal manusia perlu ditingkatkan. Karena masih menjadi sorotan utama publik

yaitu terkait proporsionalitas alokasi belanja yang masih didominasi impor dibandingkan alokasi belanja investasi pembangunan dan infrastruktur dasar. Zakat bisa menjadi konsep yang bisa dimasukkan dalam RAPBN di Indonesia terkait pengeluaran pemerintah dalam bidang bantuan sosial, di mana zakat akan membantu mempercepat pertumbuhan ekonomi karena konsep zakat adalah modal di dalam masyarakat harus berputar.

3. Pemerintah harus lebih fokus pada kemandirian ekonomi, yaitu mengurangi ketergantungan negara terhadap sumber-sumber pembiayaan luar negeri dengan mengusahakan percepatan pertumbuhan investasi domestik yang akan mempercepat akumulasi modal sehingga lambat laun Indonesia tidak mengandalkan hutang luar negeri sebagai tambahan defisit anggaran. Menerbitkan Sukuk Negara dan memaksimalkan pajak bisa menjadi solusi dalam meminimalisir pinjaman pemerintah yang berbasis bunga.
4. Akselerasi perbankan syariah sebagai penggerak perekonomian perlu mendapat dukungan, yaitu melalui kebijakan-kebijakan strategis khususnya pengembangan pada sektor riil untuk mendorong pertumbuhan perbankan syariah di seluruh provinsi di Indonesia. Selain itu, Bank Indonesia sebagai otoritas moneter di Indonesia diharapkan memberikan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat mengenai perbankan syariah, baik dari sisi operasional maupun produk-produk yang ditawarkan.
5. Diharapkan bagi penelitian selanjutnya untuk mengembangkan analisis dan hasil lebih lanjut, serta menambah berbagai variabel dalam berbagai model pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Serta khususnya memperdalam peran Pembiayaan Syariah terhadap variabel makro ekonomi lainnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Ardiansyah, Herman., "Pengaruh Inflasi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia", *Jurnal Pendidikan Ekonomi*, Vol. 5, No. 3, Tahun 2017, Surabaya: Program Studi Pendidikan Ekonomi Jurusan Pendidikan Ekonomi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Surabaya.
- Ardi, Muhammad., 2018, "Pengaruh Sukuk Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia", *IQTISHADUNA*, Vol. IX, No. 1, Juni 2018.
- Azwar., "Peran Alokatif Pemerintah Melalui Pengadaan Barang/Jasa dan Pengaruhnya Terhadap Perekonomian Indonesia", *Kajian Ekonomi & Keuangan*, Vol. 2, No. 2, Agustus 2016.
- Bank Indonesia., 2018, *Laporan Perekonomian Indonesia 2018*, Jakarta: Bank Indonesia..
- Basuki, Agus Tri., 2016, *Analisis Regresi dalam Penelitian Ekonomi & Bisnis (Dilengkapi Aplikasi SPSS & Eviews)*, Yogyakarta: RajaGrafindo Persada.
- Danawati, Sri., dkk., "Pengaruh Pengeluaran Pemerintah dan Investasi Terhadap Kesempatan Kerja, Pertumbuhan Ekonomi Serta Ketimpangan Pendapatan Kabupaten/Kota di Provinsi Bali", *E-Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, Vol. 5, No. 7, Tahun 2016, Bali: Fakultas Ekonomi Universitas Udayana (UNUD).
- Departemen Perbankan Syariah, 2019, *Roadmap Perbankan Syariah Indonesia 2015-2019*, Jakarta: Otoritas Jasa Keuangan Syariah.
- Fatturoyhan., Mufti Afif., 2017, "Pembiayaan Defisit APBN Menurut Umer Chapra (Studi Analisa Kritik Terhadap Pembiayaan Defisit APBN Indonesia Periode 2010-2015)",

- CAKRAWALA: *Jurnal Studi Islam*, Vol. XII, No. 1, Tahun 2017, Ponorogo: Universitas Darussalam Gontor, Siman Ponorogo.
- Fitria, Tira Nur., 2016, “Kontribusi Ekonomi Islam dalam Pembangunan Ekonomi Nasional”, *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, Vol. 02, No. 03, November 2016, Solo: STIE-AAS Surakarta.
- Gempito., 2010, “Pemikiran Kebijakan Fiskal Ekonomi Islam”, *JURIS*, Vol. 9, No. 1, Juni 2010, Batusangkar: Lektor STAIN Batusangkar.
- Ilyas, Rahmat., “Konsep Pembiayaan dalam Perbankan Syariah”, *Jurnal Penelitian*, Vol. 9, No. 1, Februari 2015, Bangka Belitung: STAIN Syaikh Abdurrahman Siddik.
- Junaedi, Dedi., “Hubungan Antara Utang Luar Negeri dengan Perekonomian dan Kemiskinan: Komparasi Antarezim Pemerintahan”, *Simposium Nasional Keuangan Negara*, dikutip dari <http://www.jurnal.bppk.kemenkeu.go.id/snkn/article/view/154>, diakses pada 09 November 2018.
- Karim, Adiwarmanto A., 2014, *Ekonomi Makro Islam (Edisi 3)*, Jakarta: Rajawali Pers.
- Luthfi, Faisol., 2018, “Hutang Luar Negeri Indonesia Ditinjau dari Perspektif Ekonomi Islam”, *EQUILIBRIUM: Jurnal Ekonomi Syariah*, Vol. 6, No. 2, Tahun 2018, Surabaya: Universitas Airlangga.
- MS, M. Zahari., “Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Jambi”, *Jurnal of Economics and Business*, Vol. 1, No. 1, September 2017, Jambi: Dosen Fakultas Ekonomi Universitas Batanghari.
- Muhajirin., 2015, “Konsep Hutang Negara dalam Perspektif Hukum Ekonomi Islam (Studi Analisis Antara Konsep Anggaran *Balance Budget* dengan *Defisit Budget*)”, *Al Mashlahah Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam*, Vol. 3, No. 6, Tahun 2015, Depok: STAI Al-Hamidiah.
- Muttaqin, Rizal., “Pertumbuhan Ekonomi dalam Perspektif Islam”, *Maro, Jurnal Ekonomi Syariah dan Bisnis*, Vol. 1, No. 2, November 2018, Bandung: Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) STAI Yapata Al-Jawami.
- Rahmawati, Lilik., 2008, “Kebijakan Fiskal dalam Islam”, *Al-Qanun*, Vol. 11, No. 2, Desember 2008, Surabaya: Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel.
- Romi, Syahrur., Etik Umiyati., “Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi dan Upah Minimum Terhadap Kemiskinan di Kota Jambi”, *e-Jurnal Perspektif dan Pembangunan Daerah*, Vol. 7, No. 1, Januari-April 2018.
- Septiatin, Aziz., dkk., “Pengaruh Inflasi dan Tingkat Pengangguran Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia”, *I-Economic*, Vol. 2, No. 1, Juli 2016.
- Syaparuddin, dkk., “Pengaruh Hutang Luar Negeri Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia, Thailand, Malaysia, Filipina, Vietnam dan Burma Periode 1990-2013”, *Jurnal Paradigma Ekonomika*, Vol.10, No. 01, April 2015, Jambi: Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Program Studi IESP Universitas Jambi.
- Terminanto, Ade Ananto., Ali Rama., “Pengaruh Belanja Pemerintah dan Pembiayaan Bank Syariah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi: Studi Kasus Data Panel Provinsi di Indonesia”, *IQTISHADIA*, Vol. 10, No. 1, Tahun 2017, Jakarta: Fakultas Ekonomi dan Bisnis UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Tim Penerjemah Al-Qur’an Departemen Agama Republik Indonesia Jakarta., 1994, *Al-Qur’an dan Terjemahannya*, Semarang: PT. Kumudasmoro Grafindo.
- Zakiyah, Kuni., 2018, “Peran Pengendalian Inflasi dalam Tinjauan Perspektif Al-Qur’an”, *The International Of Applied Business (TIJAB)*, Vol. 2, No. 1, April 2018.